

DAFTAR PUSTAKA

- Arifidiar, I. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Sambas). *Nestor Magister Hukum*.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Menejemen (Pertama)*. Bandung: Alfabeta.
- Buku Saku Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Egetan, M. (2015). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Utara*. 1–11.
- Mamahit, S. (2017). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pendi. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Administrasi Negara*, 5(3), 6119–6128.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, (2016)*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, (2019)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)*.
- PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa , (2018)*.
- Perda Kabupaten Gresik NOMOR 3 tahun 2010 tentang BPD, (2010)*.
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, (2007).

Permendagri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. , (2008).

Permendes PDTT Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Risala, F. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan periode 2008-2014. *Ilmu Pemerintahan, 2*.

Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Ilmu Pemerintahan, 3*, 36–54.

Sami'an, & A. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.

Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurusan Pendidikan Ekonomi, 6*.

Sasundame, R. (2015). kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan likupan selatan. *Administrasi Publik*.

Siagian. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, N. (2016). *efektifitas pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna*.

Surat menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , (2014).

<http://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/icw-korupsi-terbanyak-terkait-dana-desa/> diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 12:30

<http://m.bangsaonline.com/> diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 12:40

<http://www.bpkp.com/> Diakses pada tanggal 14 april 2020